

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### A. Tinjauan Pustaka

*Pertama* penelitian yang di tulis oleh Roni Panji Utomo ini memiliki judul “Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Semarangan 5 Sidokarto Godean Sleman Tahun ajaran 2015-2016.

Penelitian ini bertujuan untuk bisa memberikan informasi tentang manajemen pendidikan injkusi di SD N Semarangan 5 Sidokarto Godean Sleman pada tahun ajaran 2015-2016 serta memberikan apa saja factor penghambat serta pendukung pendidikan inklusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah dilaksanakan dengan rapat sekolah bersama guru dan komite sekolah. Visi, misi, dan tujuan mendukung terwujudnya sekolah inklusif. Penyusunan program penyelenggaraan dan pengembangan sekolah dilaksanakan di dalam rapat bersama guru berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diawali dengan mengeluarkan surat keputusan pembentukan panitia yang diteruskan dengan pembuatan pedoman PPDB. Guru Pembimbing Khusus(GPK) sekolah di dalam kelas bertugas mendampingi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dalam mengikuti program pembelajaran. Sekolah belum membuat kurikulum inklusif yang fleksibel untuk PDBK. Fleksibilitas dilakukan di kelas secara langsung oleh guru. Manajemen sarana dan prasarana sekolah dilaksanakan dengan membuat buku inventaris sekolah. Sarana dan prasarana

sekolah sudah dibuat aksesibel untuk PDBK. GPK tidak mengadakan pelatihan pendidikan inklusif secara khusus untuk staf sekolah akan tetapi kepala sekolah mengirimkan guru dan staf ke pendidikan dan pelatihan pendidikan inklusif yang diadakan pemerintah kabupaten dan provinsi. Sekolah memiliki kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan asesmen PDBK yang baru diterima. Sekolah juga memiliki kerja sama dengan masyarakat dalam proses manajemen pendidikan inklusif. Faktor pendukung manajemen pendidikan inklusif SD N Semarangan 5 yaitu masyarakat yang mendukung keberadaan sekolah inklusif di daerah tempat tinggal. Faktor penghambat manajemen pendidikan inklusif SD N Semarangan 5 mencakup guru yang pasif dalam menerapkan pendidikan inklusif, tidak ada dana khusus inklusif dari pemerintah, kurangnya tenaga pendidik (GPK), sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Otentitas Penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada subyek penelitian yang akan di lakukan di sekolah dasar dan juga penerapan manajemen pendidikan inklusi serta faktor penghambat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada subyek yang akan di teliti dimana penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana penerapan manajemen inklusi pada sekolah dasar baik swasta maupun negeri yang ada di Yogyakarta dan juga model seperti apa yang tepat di terapkan dalam manajemen pendidikan inklusi yang tidak mendiskriminasikan penyandang disabilitas.

*Kedua* penelitian yang selanjutnya di tulis oleh Menik Sulistyaningrum ini memiliki judul “Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto selama ini, menemukan apa yang menjadi kendala keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto; menemukan upaya sekolah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto

Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan empat guru Inklusif. Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa: Ada standar/ kriteria khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu berupa surat keputusan Bupati Banyumas tentang penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun 2011 dengan nomor surat 421/149/2011, yang masing-masing setiap sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif mendapatkan surat keputusan tersebut. Pendidikan Inklusif merupakan salah satu model pendidikan yang dirancang secara khusus, dan merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya bagi mereka Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Demikian juga proses pembelajaran di kelas inklusif, walaupun siswanya heterogen, tidak ada perbedaan yang begitu berarti dengan proses pembelajaran di kelas reguler. Menurut penulis dalam penelitian ini proses pembelajaran di kelas inklusif cukup berhasil, dan keberhasilan dalam proses

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari guru, siswa, lingkungan, sarana prasarana, dan evaluasi pembelajaran.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada mengevaluasi penerapan sebuah program ataupun kebijakan dan juga penelitian inklusif yang di lakukan di lingkup sekolah dasar. Dalam perbedaannya sendiri peneliti terdahulu meneliti untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan kebijakan dalam pendidikan inklusif sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana penerapan manajemen inklusi pada sekolah dasar baik swasta maupun negeri yang ada di Yogyakarta dan juga model seperti apa yang tepat di terapkan dalam manajemen pendidikan inklusi yang tidak mendiskriminasikan penyandang disabilitas

*Ketiga* penelitian yang ketiga ini di tulis oleh Adriadi ini memiliki judul “Manajemen Pendidikan Inklusi di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) memaparkan dan menambah wawasan kita tentang pendidikan inklusi; (2) mengetahui unsur-unsur manajemen pendidikan inklusi dan penerapannya di Sekolah; (3) menjadikan gambaran bagi sekolah yang hendak menjadikan sekolahnya sebagai sekolah inklusi seperti apa yang telah dilakukan oleh MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil latar di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber utama penelitian ini adalah Kepala sekolah dan manajer pendidikan inklusi sebagai pembuat kebijakan di sekolah, termasuk lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pola manajemen pendidikan inklusi yang diterapkan di MAN Maguwoharjo relatif sederhana. dan pada pelaksanaannya dari tahun ke tahun MAN Maguwoharjo masih terdapat upaya untuk menemukan pola manajemen pendidikan inklusi yang sesungguhnya. Kedua, pada aspek manajemen pendidikan inklusi di MAN Maguwoharjo meliputi: aspek peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dana dan lingkungan masyarakat. Ketiga, selama ini penerapan pola manajemen terhadap aspek-aspek ini sudah dapat terlaksana dengan efektif, yaitu beberapa siswa difabel dapat mengikuti dengan baik. Keempat, terdapat faktor pendukung yang memperlancar jalannya pendidikan inklusi di lembaga ini, faktor penghambat, serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Kelima, pada keberhasilan belajarnya, sudah terdapat beberapa siswa yang telah berhasil mengikuti dengan baik.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada manajemen pendidikan inklusi yang akan diteliti. Namun untuk perbedaan sendiri lumayan signifikan di karenakan penelitian terdahulu tidak mengevaluasi manajemen pendidikan inklusi dan juga subyek penelitiannya berada di Sekolah menengah sedangkan penelitian ini mengambil subyek di sekolah dasar dan mengevaluasi manajemen pendidikan yang telah berjalan.

*Keempat* pada penelitian yang ke empat ini ditulis oleh Hega Raka Ardana ini memiliki judul “Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama PGRI Kecamatan Kasihan”

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan peserta didik sekolah inklusif di SMP PGRI Kasihan; (2) Pembinaan peserta didik sekolah inklusif di SMP

PGRI Kasihan; (3) Evaluasi peserta didik sekolah inklusif di SMP PGRI Kasihan; (4) Mutasi peserta didik sekolah inklusif di SMP PGRI Kasihan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, pustakawan dan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai subyek pendukung. *Setting* penelitian di SMP PGRI Kecamatan Kasihan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model interaktif dari *Miles dan Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Analisis kebutuhan peserta didik diprioritaskan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dari pada peserta didik normal, sehingga tidak ada pembatasan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dalam pemenuhan kuota (144 peserta didik). Kemudian, peserta didik berkebutuhan khusus harus melampirkan bukti hasil *assesment* guna memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran; (2) Pembinaan peserta didik sekolah inklusif di SMP PGRI Kasihan khususnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus diberikan perhatian dan Pembimbingan yang lebih intensif dibandingkan peserta didik normal. Pembinaan peserta didik berkebutuhan khusus, guru melibatkan peserta didik normal khususnya dalam pemberian motivasi dan peningkatan percaya diri; (3) Evaluasi peserta didik sekolah inklusif di SMP PGRI Kasihan antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus, indikator penilaiannya sama berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan proses penilaiannya sama. Namun, terdapat perbedaan pada pemaknaan penilaian yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal; (4) Mutasi intern peserta didik berkebutuhan khusus diberikan keleluasaan dalam melakukan perpindahan kelas disesuaikan dengan

keinginan ABK, sedangkan untuk mutasi ekstern peserta didik berkebutuhan khusus melampirkan bukti hasil *assessment*.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada bidang penelitian yaitu pendidikan inklusif. Dalam perbedaannya sendiri terdapat beberapa hal yang signifikan perbedaannya yaitu dalam subyek penelitiannya. Penelitian yang terdahulu meneliti di sekolah menengah pertama sedangkan penelitian ini meneliti dengan subyek sekolah dasar dan juga penelitian terdahulu meneliti tentang manajemen peserta didik sedangkan penelitian ini meneliti tentang manajemen pendidikan sekolah dasar inklusi.

*Kelima* penelitian yang di tulis oleh Latifa Garnisti Rifani ini memiliki judul “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta”

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, mencakup (1) mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta sesuai atau tidak dengan delapan standar pendidikan inklusif yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) mendeskripsikan berbagai hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta, dan (3) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi program dengan pendekatan model Discrepancy (kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas 1-6, dan guru

pembimbing khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) hambatan yang dihadapi adalah jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif, dan (3) solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah GPK memberikan dampingan konsultatif kepada guru reguler, serta GPK dan guru reguler melakukan kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Otentisitas penelitian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tidak begitu signifikan di karenakan subyek yang berada di sekolah dasar dan juga penelitian ini meneliti tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

*Keenam* penelitian jurnal yang di tulis oleh Hendro Sugiyono ini memiliki judul “Metode Evaluasi pembelajaran Inklusif Bagi Peserta Didik Difabel Netra” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana fenomena-fenomena yang diungkap dijelaskan dengan narasi deskriptif.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai agar dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan juga aspek proses pembelajaran sebagai satu hal yang terintegrasi. Untuk dapat mengetahui hasil-hasil dari proses pembelajaran secara obyektif, maka tiap peserta didik haruslah mendapatkan bentuk evaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



Hasil dari penelitian ini adalah Untuk mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran inklusif, maka evaluasi pembelajaran pun harus bersifat inklusif. Dari pemaparan di atas, setidaknya dapat dirumuskan beberapa metode evaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusif, khususnya bagi peserta didik difabel netra, yang dapat dijadikan acuan diberbagai satuan pendidikan, baik sekolah dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi. Metode-metode tersebut adalah: ujian mandiri dengan komputer bicara, ujian dengan menggunakan Pembimbing resmi ataupun Pembimbing bebas, dan ujian dalam bentuk lisan.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada tema dari penelitiannya yaitu tentang evaluasi tentang pendidikan inklusi. Sedangkan perbedaan yang sangat signifikan adalah dalam subyek penelitian itu sendiri. Penelitian ini meneliti di ranah sekolah dasar dan penelitian terdahulu meneliti tentang penelitian tingkat kenaikan dari peserta didik bekebutuhan khusus.

*Ketujuh* jurnal yang di tulis oleh Dian Putera Karana ini memiliki judul “Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma’arif Pagerharjo Samigaluh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi dengan model *discrepancy*. Responden penelitian berjumlah 41 orang. Data dikumpulkan menggunakan angket dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk angka dan persentase, di mana data yang berwujud angka-angka tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam kata-kata atau kalimat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) keefektifan manajemen pendidikan inklusif (MPI) dilihat dari standar pelayanan minimum, (2) perbedaan MPI di SD

negeri dengan MPI di SD swasta, (3) hambatan dalam pelaksanaan MPI, dan (4) solusi dan rekomendasi untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan MPI

Hasil penelitian ini (1) MPI di SDN Gadingan dilihat dari standar pelayanan minimum termasuk dalam kategori sangat baik dan di MI Ma'arif Pagerharjo termasuk kategori baik. (2) Perbedaan MPI di SDN Gadingan dan MI Ma'arif Pagerharjo terletak pada komponen standar: pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. (3) Hambatan: belum adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, minimnya jadwal guru pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, minimnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana. (4) Solusi: menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif, menambah waktu/jadwal guru pembimbing khusus untuk mendampingi guru reguler, mengusulkan penambahan anggaran dan memenuhi sarana dan prasarana, serta rekomendasinya: pengembangan wawasan dan pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan, optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana, dan pemenuhan kebutuhan anggaran/pembiayaan.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen pendidikan inklusi di sekolah dasar yang ada di wilayah Yogyakarta. Untuk perbedaannya sendiri penelitian ini meneliti tentang evaluasi penerapan dari manajemen inklusi yang telah di jalankan sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan penerapannya.

*Kedelapan* jurnal yang di tulis oleh Evi Isna, Sri Suneki, Husni Wakhyudin ini memiliki judul Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah dan empat guru kelas. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penanganan guru terhadap anak berkebutuhan khusus SDN Barusari 01 Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menangani langsung pelaksanaan pendidikan. Penanganan yang diberikan sudah baik seperti pemberian respon dan perhatian khusus terhadap anak berkebutuhan khusus.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu ialah pada tema penelitian yaitu manajemen pendidikan inklusi. Dan perbedaannya sendiri terletak pada lokasi penelitian yang berada di Semarang sedangkan penelitian ini berada di Yogyakarta.

*Kesembilan* jurnal yang di tulis oleh Haryono, Ahmad Syaifudin, dan Sri Widiastuti ini memiliki judul “Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat evaluatif dan dirancang menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Subjek penelitian ini meliputi guru, wali murid, kepala sekolah, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi komponen implementasi manajemen inklusif yang berada pada provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, rumusan simpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa (1) manajemen kesiswaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan, (2) manajemen kurikulum pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang, (3) manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang, (4) manajemen sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai

kurang. Hal ini disebabkan penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak normal tidak dibedakan. Sarana dan prasarana khusus bagi siswa ABK masih diabaikan, (5) manajemen pembiayaan pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang, (6) manajemen lingkungan dan layanan khusus pada pendidikan inklusif di Provinsi Jateng dinilai kurang.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kesamaan tema penelitian tentang evaluasi pendidikan inklusif. Perbedaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu jika penelitian terdahulu berlokasi di provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian ini berlokasi di Yogyakarta.

*Kesepuluh* jurnal yang ditulis oleh Nina Hastina dan Dahniar Harahap ini memiliki judul “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Medan Marelan”. Tujuan penelitian ini yaitu penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan SD penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil dari penelitian ini adalah perlu tindakan refleksi dan perbaikan pada komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu (1) Tenaga Pendidik khusus untuk guru Pembimbing khusus (GPK). (2) Sarana dan Prasarana yang belum menyesuaikan kebutuhan ABK secara keseluruhan. (3) Keuangan/Dana dari pemerintah untuk penyelenggara pendidikan inklusif. (4) Evaluasi tingkat daerah dan Nasional (UN) khusus untuk siswa ABK di sekolah reguler.

Otentisitas penelitian, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tema penelitian yaitu tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan juga subyek penelitian dalam jenjang sekolah dasar. Untuk perbedaannya terletak

pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Medan Sumatera Utara sedangkan penelitian ini terletak di Yogyakarta.

## B. Kerangka Teoritis

### 1. Evaluasi Program

#### a. Pengertian Evaluasi

Secara harfiah kata "evaluasi" yang berasal dari bahasa Inggris memiliki arti *evaluation*, *evaluation* dalam bahasa Arab "al-Taqdir", dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa Arab "al-Qimah"; dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pembelajaran adalah nilai dari hal-hal yang berkaitan pada pembelajaran terkhusus pada bidang pendidikan. Adanya evaluasi ini merupakan tujuan akhir dari lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal

Menurut Arikunto (1993:3) menjelaskan bahwa kata evaluasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Oemar Hamalik (2002:210) menjelaskan evaluasi merupakan proses berkelanjutan pada sebuah pengumpulan dan tafsiran informasi yang di gunakan sebagai penilaian keputusan yang di buat untuk sistem pengajaran.

Nana Sujana (1990:3) menjelaskan evaluasi merupakan proses untuk memberikan penilaian terhadap sebuah obyek tertentu yang memiliki dasar terhadap kriteria tertentu.

Selanjutnya menurut Slameto (2001:6) menerangkan jika evaluasi memiliki artian sebagai berikut: 1) Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan, 2) Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar, 3) Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan, dan 4) Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang diharapkan.

Dari berbagai definisi yang telah di jabarkan di atas dapat di ambil kesimpulan jika evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk menentukan ataupun memberikan nilai-nilai tertentu dengan acuan terhadap kriteria – kriteria tertentu untuk bisa mendapatkan tujuan yang telah di tentukan. Atau dalam lingkup ini untuk melihat dan juga menilai taraf ketercapaian dalam program bimbingan belajar ini

#### b. Fungsi Evaluasi

Menurut Zainal Arifin ( 2012:16) terdapat 4 fungsi evaluasi berdasarkan jenisnya yaitu :

1) Penilaian formatif

Penilaian ini merupakan penilaian yang di lakukan setiap akhir semester pembelajaran. Memiliki fungsi untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar.

2) Penilaian sumatif

Penilaian ini merupakan setiap catur wulan atau setelah siswa telah menyelesaikan mata pelajaran yang telah di tentukan. Memiliki fungsi untuk menentukan angka ataupun hasil proses pembelajaran siswa dengan tahapan yang telah di sesuaikan.

3) Penilaian penempatan

Penilaian yang di dapat di jadikan sebagai dasar untuk bisa menyeleksi dan juga menempatkan siswa berdasarkan minat dan juga kemampuannya. Memiliki fungsi untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat bagi siswa.

4) Penilaian diagnostik

Memiliki fungsi sebagai solusi dari permasalahan siswa yang kesulitan dalam proses belajar mengajar

Sudio-jono sebagaimana di kutip Hendro (2015:97) secara menyeluruh fungsi evaluasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Dalam ranah psikologi, peserta didik selalu membutuhkan tujuan ataupun keinginan yang telah di informasikan untuk tercapainya tujuan tersebut. Dan juga peserta didik juga perlu mengetahui sejauh mana perkembangan dirinya dalam bidang akademik sehingga bisa timbul kepuasan dan

ketenangan pada diri siswa tersebut. Oleh sebab itu guru perlu mengevaluasi pencapaian siswanya.

- 2) Dalam lingkup psikologi, evaluasi ini bisa berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh anak tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Hal ini tentunya bisa memberikan pengaruh yang berbeda terhadap institusi yang bersangkutan.
- 3) Secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi agar guru bisa menempatkan siswa dengan metode yang sesuai dengan anak tersebut sehingga apabila tidak sesuai dengan yang di harapkan guru bisa mengevaluasi metode tersebut

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi adalah untuk membuat program yang telah berjalan menjadi semakin lebih baik lagi. Selain itu, fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan dari peserta didik apakah mengalami kemajuan ataupun tidak serta untuk mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan selama program bimbingan belajar sedang berlangsung.

#### c. Tujuan Evaluasi

Muhibbin Syah (2002:142) dalam bukunya menjelaskan tujuan evaluasi yaitu : 1) mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. 2) mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya. 3) mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. 4) mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan belajar, dan 5) mengetahui tingkat daya



guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar.

Arikunto dan Cepi (2004:3) menjelaskan jika evaluasi memiliki tujuan : 1) memacu kegiatan siswa; 2) menemukan faktor pendukung dan penghambat pembelajaran; 3) proses belajar mengajar yang sesuai; 4) memberikan perkembangan siswa terhadap wali murid; dan 5) adanya timbal balik karena program yang di buat tidak hanya untuk perseoangan .

Nana dan Ahmad (1998:142) menjelaskan jika tujuan evaluasi menetapkan tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah berjalan. Atau bisa di katakan adanya evaluasi untuk bisa mengukur apakah sudah efektif dan juga efisien sehingga ketika belum, bisa sebagai perbaikan dan penyempurnaan program selanjutnya.

Dari beberapa macam pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan kualitas peserta didik dalam proses belajar mengajarnya sehingga tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

#### d. Model Evaluasi CIPP

Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967).

CIPP singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:

*Context evaluation* : evaluasi terhadap konteks

*Input evaluation* : evaluasi terhadap masukan

*Process evaluation* : evaluasi terhadap proses

*Product evaluation* : evaluasi terhadap hasil

Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) merupakan model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki (Stufflebeam, H McKee and B McKee, 2003:118)

Berikut akan dijelaskan dari masing-masing huruf CIPP:

1) Evaluasi konteks

Adanya evaluasi ini di gunakan sebagai gambaran dalam merinci kebutuhan yang belum bisa di penuhi, populasi dan sampel, yang di layani dan tujuan program.

2) Evaluasi masukan

Evaluasi yang di lakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan awal siswa dan program sekolah dalam program yang di buatnya.

3) Evaluasi proses

Evaluasi ini menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam model ini, diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program program sudah terlaksana sesuai dengan rencana.

4) Evaluasi Produk atau Hasil

Evaluasi ini diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah, dalam contoh PMTAS

adalah siswa yang menerima makanan tambahan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir dari rangkaian evaluasi program.

## 2. Pendidikan Inklusi

### a. Pengertian Pendidikan Inklusi

Sapon-Sevin dalam Ahmad Wasita (2012:78) menjelaskan pendidikan inklusi sebagai sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Oleh karena itu, beliau menekankan adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.

Ineu (2010:1) menjelaskan jika pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan.

### b. Latar Belakang Pendidikan Inklusi

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan . Pendidik sebisa mungkin agar bisa selalu memperhatikan dan juga memberikan pelayanan atau kebutuhan terhadap peserta didiknya, tidak terkecuali bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dengan demikian peseta didik pun akan terbentuk pola pikir untuk bisa di gunakan pada pertumbuhan dan penyesuaian yang akan datang (Akbar,2001:14).

Menurut Tarsidi dalam buku Illahi (2003:31) pada akhir 1990-an dalam upaya meningkatkan pendidikan dan mengembangkan pendidikan di susunlah program kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan PLB. Dalam psal tersebut mengungkapkan bahwa “Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua

c. Tujuan Pendidikan Inklusi

Menurut Akbar (2001:14) menjelaskan ada 2 tujuan pendidikan Inklusi, yaitu :

- 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

d. Landasan Pendidikan Inklusi

Terdapat 5 landasan yang di gunakan sebagai dasar dalam pendidikan Inklusi menurut Religiana (2016:14) yaitu:

- 1) Landasan Filosofis.

Landasan filosofis pendidikan inklusi adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Dengan landasan

Bhineka Tunggal Ika maka kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai atas segala perbedaan yang ada. Filosofi Bhineka Tunggal mencerminkan bahwa di dalam setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Secara umum, pendidikan berperan penting untuk menggali potensi dan mengembangkannya. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memberdayakan potensi manusia, baik aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Sementara keunggulan dan kekurangan merupakan cerminan dari kebhinekaan yang merangkul semua perbedaan yang ada, baik agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan keterbatasan fisik dan mental. Pendidikan tak seharusnya mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi anak berkebutuhan memasuki pendidikan formal. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam.

## 2) Landasan Religius.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak bisa lepas dari konteks agama karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lain berbeda (*individual differences*). Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain agar saling berhubungan dan saling melengkapi dengan segala aspek keberadaannya (QS Al-Hujarat [49]: 13). Anak didik yang membutuhkan layanan pendidikan inklusi pada hakikatnya adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk yang berbeda atau *individual differences*.

### 3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan sedunia. Sementara di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 31 (1), serta Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### 4) Landasan Pedagogis.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dengan jaminan Undang-Undang ini, pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus akan semakin berkembang.

### 5) Landasan Empiris.

Beberapa peneliti melakukan analisis terhadap penerapan pendidikan inklusi. Hasil analisis yang dilakukan oleh Calberg dan Kavale (1980) terhadap tindakan penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 tindakan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya (dikutip Mohammad Takdir Illahi, 2003: 80)

e. Model Pengelolaan Kelas di Sekolah Umum

Menurut Azhar (2013:93) menjelaskan jika terdapat 4 pengelolaan model pembelajaran yang bisa di terapkan dalam proses belajar mengajar, yaitu:

1) Humanistik

Menurut Carl Rogers Model humanistik dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitikberatkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, sistem supervise, dan pengembangan internal individu pembelajar.

Michael Marland juga mendeskripsikan beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan kelas model humanistik, yang mencakup :

- a) Mempedulikan pembelajar (*caring for children*), pembelajar harus menunjukkan sikap peduli kepada pembelajar,
- b) Membuat aturan (*setting rules*),
- c) Memberikan penghargaan (*giving legitimate praise*),
- d) Menggunakan humor (*using humor*), dan
- e) Merancang dan membentuk lingkungan belajar (*shaping the learning environment*).

2) Behavioristik

Teori *Operant Conditioning Skinner* Model behavioristik pada pengelolaan kelas menekankan pada peran vital pembelajar dan arahan

atau instruksi dari pembelajar. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kegagalan untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Model ini menganjurkan adanya atau diberlakukannya konsekuensi- konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas, disamping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip model behavioristik yang diterapkan dalam praktek pembelajaran menurut *Hartley* dan *Davies* adalah :

- a) “Proses belajar dapat terjadi dengan baik bila pembelajar ikut terlibat aktif.
  - b) Materi pelajaran disusun dalam urutan yang logis supaya pembelajar mudah mempelajari dan dapat memberi respon tertentu.
  - c) Tiap-tiap respon harus diberi umpan balik secara langsung. Setiap kali pembelajar memberikan respon yang benar perlu diberi penguatan”.
- 3) Demokratik

Model ini memiliki tingkat menghargai perbedaan dan juga hak individu dari peserta didik. Dalam metode ini peserta didik di berikan kebebasan untuk bisa aktif dalam pengelolaan kelas. Pendekatan yang di berikan adalah *relatively studentcentered*. Pada saat yang sama pula, adanya peran dari peserta didik memiliki porsi yang besar. Terdapat 3



cara yang di gunakan agar bisa tetap fokus ketika proses belajar mengajar berlangsung. Yaitu:

- a) Mengembangkan cara-cara yang dapat membuat para pebelajar memiliki sikap tanggung jawab, seperti: pemberian tugas individual, presentasi, produk dan uji kompetensi.
- b) Menggunakan kelompok, dan
- c) Memformat kelas atau materi pelajaran yang minim dengan kebosanan

#### 4) Konstruktifis

Model ini adalah sebuah terjemahan dari model DePorter yaitu menekankan terhadap *student centre* ketika proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga siswa di tuntut agar bisa ikut berperan aktif selama proses belajar mengajar.

#### f. Model Pengelolaan Kelas di Sekolah Inklusi

Gallagher (1986) yang di kutip dalam Ina (2016:29) memberikan uraian yang lebih rinci tentang berbagai model penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu :

##### 1) *Pure Inclusion* (inklusi penuh)

Pada model ini pendidikan atau layanan yang di peroleh bagi siswa berkebutuhan khusus (ABK) pada kelas reguler dengan anak yang lainnya. ABK mendapatkan layanan pendidikan yang berdasarkan kemampuan dan juga kebutuhannya. Kurikulum pun juga mengikuti apa yang di butuhkan anak tersebut.

2) *Consultant Teacher* (Guru Konsultan)

Pada model ini sekolah yang terdekat dari rumah mereka merupakan tujuan dari anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut. Setengah dari waktu yang dia gunakan untuk belajar di berikan oleh guru biasa pada sekolah setempat. Dalam program ini guru konsultan menggunakan beberapa waktunya untuk mengadakan proses belajar mengajar secara langsung terhadap siswa ABK

3) *Itinerant Teacher* (Guru Keliling)

Pada model ini tidak jauh berbeda dengan guru konsultan. Yang membedakan adalah porsi yang di gunakan untuk bertatap muka ketika proses belajar mengajar dengan siswa ABK lebih banyak waktunya

4) *Resource Room Program* (Kelas Sumber Belajar)

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terdaftar pada suatu sekolah biasa (umum), dimana terdapat di dalamnya suatu kelas khusus yang digunakan untuk melaksanakan pengajaran khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

5) *Special Class* (Kelas Khusus)

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terdaftar dalam sebuah kelas khusus yang ada pada sekolah reguler. Pengajaran pada kelas ini biasanya relatif padat/penuh dan berlangsung sepanjang jam (jam sekolah).

6) *Special School* (Sekolah Khusus)

Model ini berbentuk lembaga sekolah yang secara khusus diperuntukkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ini merupakan

model penyelenggaraan pendidikan yang benar-benar terpisah dari program pendidikan umum (reguler). Model ini dikenal dengan istilah Sekolah Luar Biasa (SLB).

g. Model Kurikulum Sekolah Inklusi

Lelly Kholida (2016:6) menjelaskan jika terdapat 3 model kurikulum pendidikan inklusi terdiri dari :

1) Model kurikulum reguler

Model kurikulum ini menempatkan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa lainnya dalam satu kelas

2) Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Model kurikulum ini telah mendapat modifikasi oleh seorang guru terhadap strategi dan juga jenis penilaiannya dengan memiliki acuan terhadap siswa berkebutuhan khusus tersebut.

3) Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI)

*Individualized Educational Program (IEP)* merupakan pendekatan yang memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi. Selain program akademik, maka untuk mencapai tujuan institusioanal yang komprehensif sangatlah dibutuhkan layanan bimbingan dan Manajemen Pendidikan Inklusi konseling yang memadai sehingga menjadikan peserta didik dapat mencapai kematangan personal, sosial dan karir.

h. Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 terdapat macam-macam anak berkebutuhan khusus terdiri dari :

### 1) Tunanetra

Tunanetra sebagai suatu kondisi yang pada seseorang, yaitu hilangnya daya penglihatan untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga untuk menempuh pendidikan harus menggunakan indera pendengaran, perabaan, dan penciuman. Dari definisi di atas yang dikemukakan ahli dapat disimpulkan bahwa anak tunanetra merupakan anak yang kehilangan daya penglihatannya baik total maupun sebagian, sehingga di dalam pendidikan memerlukan bantuan khusus.

### 2) Tunarungu

Anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan di dalam pendengaran, anak tunarungu mengalami kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, dan berat. Ketunarunguan dikelompokkan atau digolongkan ke dalam kurang dengar (*heard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Bagi anak tunarungu yang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan bahasa oral/lisan menggunakan bahasa isyarat.

### 3) Tunawicara

Anak tunawicara yaitu anak yang mengalami kesulitan bicara, yang bisa diakibatkan kurang berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, bibir, lidah kurang berfungsinya indera pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa. Hallahan & Kauffman (2009:404) mengatakan bahwa gangguan komunikasi meliputi kelainan bicara, kelainan bahasa dan variasi di dalam komunikasi (meliputi perbedaan

komunikasi dan produksi suara). Tunawicara atau gangguan bicara adalah hambatan di dalam komunikasi verbal dan efektif.

4) Tunagrahita

Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki intelegensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan di dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita yaitu anak mengalami kondisi intelektual di bawah rata-rata dengan perilaku adaptif yang rendah.

5) Tunadaksa

Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Sehingga anak tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan fisik yang dialami anak dengan cacat tubuh yaitu ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal sehingga menghambat kegiatan individu.

6) Lamban Belajar (*Slow Lerner*)

Anak lamban belajar (*slow lerner*) yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Anak dengan lambat belajar memiliki ciri-ciri yaitu daya tangkap di dalam belajar terhambat, sering terhambat dalam menyelesaikan tugas akademik, rata-rata prestasi belajar selalu rendah dan pernah tidak naik kelas

7) Berkesulitan Belajar (*Learning Disability*)

Anak kesulitan belajar atau *learning disability* merupakan istilah yang merujuk pada keragaman kelompok yang mengalami gangguan di mana

gangguan tersebut diwujudkan di dalam kesulitan yang signifikan yang menimbulkan gangguan di dalam proses belajar.

8) Autis

Anak autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan interaksi sosial. Autis adalah suatu kondisi anak yang sejak lahir yang membuat dirinya dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal.